

Pengaruh Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Kesejahteraan Penerimaanya di Kabupaten Tana Tidung.

Melati Indrawati¹, Hendrian², Rini Yayuk Priyati²

¹⁾ Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, hetty.sofan@gmail.com

²⁾ Tenaga Pengajar Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka
Email: melati.indrawati89@gmail.com, ian@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Penyediaan hunian layak merupakan determinan penting kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni melalui pendekatan swadaya berbasis pendampingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi BSPS di Kabupaten Tana Tidung, dampaknya terhadap kesejahteraan penerima, serta faktor penghambat pelaksanaannya. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis tematik berbantuan NVivo. Temuan menunjukkan bahwa BSPS menghasilkan dampak multidimensional: perbaikan kualitas fisik hunian, peningkatan rasa aman dan kenyamanan, penguatan martabat sosial, serta tumbuhnya kepercayaan terhadap pemerintah sebagai representasi negara. Peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) terbukti krusial dalam memastikan ketepatan implementasi, penguatan partisipasi, dan keberhasilan pembangunan berbasis swadaya. Namun demikian, efektivitas program masih dibatasi oleh keterbatasan cakupan bantuan, akurasi penargetan, kapasitas swadaya masyarakat, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Penelitian ini berkontribusi dengan menegaskan bahwa keberhasilan BSPS tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan finansial, tetapi oleh kualitas tata kelola dan intensitas pendampingan partisipatif sebagai prasyarat keberlanjutan program perumahan berbasis komunitas.

Kata kunci: BSPS; Kebijakan Perumahan; Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Partisipasi Masyarakat; Kesejahteraan.

ABSTRACT

Adequate housing is a fundamental determinant of well-being for low-income households. The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) was introduced to improve substandard housing conditions through a community-based self-help approach supported by technical facilitation. This study analyzes the implementation of BSPS in Tana Tidung Regency, examines its impact on beneficiaries' welfare, and identifies key implementation challenges. A qualitative approach was employed, including in-depth interviews, observation, and document analysis, with thematic analysis conducted in NVivo. The findings reveal that BSPS generates multidimensional impacts, including improvements in housing quality, enhanced safety and comfort, strengthened social dignity, and increased trust in government institutions. The role of Field Facilitators (Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL) is identified as a critical success factor in ensuring participatory engagement, accurate implementation, and effective use of assistance. However, program effectiveness remains constrained by limited coverage, targeting inaccuracies, varying community self-help capacity, and suboptimal monitoring and evaluation mechanisms. This study contributes to the housing policy literature by demonstrating that the success of community-based housing assistance programs depends not merely on financial support, but on governance quality and participatory facilitation as key determinants of sustainability and welfare outcomes.

Keywords: BSPS; Housing Policy; Low-Income Households; Community Participation; Welfare Impact.

Pendahuluan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan instrumen kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pendekatan swadaya berbasis pemberdayaan. Program ini dirancang tidak sekadar untuk memperbaiki kondisi fisik rumah tidak layak huni (RTLH), tetapi juga untuk memperkuat kapasitas

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan berkelanjutan [1]. Dalam perspektif kebijakan sosial, perumahan layak merupakan determinan penting kesejahteraan karena berkorelasi dengan kesehatan, keamanan, produktivitas ekonomi, serta stabilitas sosial rumah tangga [2].

Di tingkat implementasi, efektivitas program perumahan sangat ditentukan oleh tata kelola, ketepatan sasaran, kapasitas partisipasi masyarakat, dan kualitas pendampingan lapangan (Howlett dan Ramesh, 2020). Studi terkini menunjukkan bahwa program bantuan berbasis komunitas akan menghasilkan dampak kesejahteraan yang lebih signifikan apabila didukung oleh fasilitasi yang intensif dan mekanisme pengawasan yang akuntabel. Sebaliknya, keterbatasan koordinasi, distribusi sumber daya, dan lemahnya monitoring seringkali menyebabkan capaian program berhenti pada output fisik tanpa transformasi kesejahteraan yang berkelanjutan [3].

Kabupaten Tana Tidung sebagai salah satu daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Provinsi Kalimantan Utara menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan hunian layak. Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung (2023) menunjukkan terdapat 427 unit RTLH, sementara cakupan BPS pada tahun berjalan hanya menjangkau 70 unit. Pada saat yang sama, jumlah penduduk dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) mencapai 2.724 orang. Ketimpangan antara kebutuhan dan cakupan bantuan tersebut mengindikasikan adanya persoalan implementasi dan keterbatasan daya jangkau program di tingkat local [4].

Meskipun berbagai penelitian mengenai BPS telah dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada aspek administratif, kepatuhan regulasi, dan capaian output fisik bangunan [5];[6]. Kajian yang menelaah dampak program secara multidimensional terhadap kesejahteraan—meliputi dimensi ekonomi, sosial, kesehatan, rasa aman, dan martabat sosial—masih relatif terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan kualitatif mendalam berbantuan perangkat lunak analisis seperti NVivo. Padahal, dalam konteks wilayah 3T, pendekatan berbasis kesejahteraan multidimensional menjadi krusial untuk memahami bagaimana intervensi perumahan berkontribusi terhadap kualitas hidup secara komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi Program BPS di Kabupaten Tana Tidung; (2) mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan penerima manfaat secara multidimensional; (3) mengidentifikasi kendala pelaksanaan program; serta (4) mengkaji peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan program. Dengan pendekatan kualitatif tematik berbantuan NVivo, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan tata kelola program perumahan berbasis swadaya di wilayah 3T.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan dampaknya terhadap kesejahteraan penerima di Kabupaten Tana Tidung pada periode 2022–2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan kontekstualitas sosial dari para aktor yang terlibat secara holistik [7] dan membantu memahami fenomena sosial kompleks dalam implementasi kebijakan program [8].

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 penerima BSPS, 1 penanggung jawab program, dan 2 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang dipilih secara purposive. Jumlah informan sebanyak 13 orang telah mencukupi syarat untuk mencapai kejenuhan tema dalam penelitian kualitatif. Data sekunder berasal dari dokumen resmi program, laporan pelaksanaan, dan regulasi terkait BSPS. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melengkapi perspektif empiris. Analisis data mengikuti model interaktif Miles & Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara siklis [9]. Reduksi data bertujuan menyaring informasi yang relevan; penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif tematik; dan penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang untuk menjaga ketepatan interpretasi.

Untuk memperkuat sistematisasi dan kredibilitas analisis tematik, penelitian ini menggunakan NVivo 11 Plus sebagai alat bantu coding dan pemetaan tema. Perangkat lunak ini memfasilitasi pengorganisasian data tidak terstruktur dan mendukung identifikasi pola serta hubungan antar kategori secara lebih terstruktur [7];[9]. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil dan pembahasan

A. Gambaran Umum Desa Sesayap

Desa Sesayap merupakan desa di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, yang terletak pada koordinat sekitar 3°35' LU dan 117°00' BT dengan ketinggian ±50 mdpl serta

didominasi dataran rendah dan lahan rawa berciri pesisir-rawa [10]. Secara administratif memiliki luas $\pm 150 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 1.626 jiwa pada tahun 2022 (842 laki-laki dan 784 perempuan) serta kepadatan sekitar 11 jiwa/ km^2 , yang menunjukkan tekanan demografis relatif rendah dan peluang pengembangan wilayah yang masih terbuka [4]. Pemanfaatan lahan meliputi permukiman, pertanian kering, kebun campuran, hutan skala kecil, serta wilayah perairan yang menopang sektor pertanian, perikanan, dan hasil hutan non-kayu. Desa ini beriklim tropis basah dengan curah hujan tinggi, kelembapan di atas 80%, dan suhu 23–35 °C yang mendukung vegetasi tropis namun berisiko genangan pada lahan pertanian. Oleh karena itu, pemahaman kondisi geografis, demografis, dan sosial ekonomi menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan desa yang terintegrasi melalui musrenbang dan koordinasi lintas pemerintahan.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui prinsip swadaya masyarakat yang didukung oleh bantuan dana dan pendampingan teknis dari pemerintah. Program ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memberikan stimulan agar masyarakat mampu memperbaiki atau membangun rumah layak huni secara mandiri [11]. Di Kabupaten Tana Tidung, pelaksanaan BSPS dilandasi oleh Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 yang mengatur persyaratan penerima, mekanisme pelaksanaan, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi program. Regulasi daerah tersebut diselaraskan dengan kebijakan nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya terkait standar teknis rumah layak huni, pengelolaan bantuan, serta penyesuaian harga satuan bahan dan upah sesuai karakteristik wilayah [12].

Pelaksanaan BSPS di Kabupaten Tana Tidung dilakukan melalui tahapan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat calon penerima, verifikasi administrasi dan kondisi fisik rumah, penetapan penerima bantuan, penyaluran stimulan, serta pendampingan dan pengawasan oleh pemerintah daerah dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Jumlah penerima BSPS menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 376 penerima pada tahun 2018, 443 penerima pada tahun 2019, dan 445 penerima pada tahun 2020. Sasaran utama program adalah MBR yang memiliki rumah tidak layak huni, memiliki legalitas lahan, serta mampu memberikan kontribusi swadaya minimal. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa BSPS berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas fisik rumah, rasa aman, dan martabat sosial penerima, sekaligus menjadi bagian dari strategi pengurangan kemiskinan berbasis pemenuhan kebutuhan dasar [13].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima BSPS di Kabupaten Tana Tidung merasakan manfaat langsung berupa perbaikan kondisi rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih aman, sehat, dan nyaman. Informan penelitian yang terdiri atas penanggung jawab program, TFL, dan penerima bantuan menyatakan bahwa BSPS sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hunian layak. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa bantuan perumahan swadaya dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin melalui peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal [14]. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi BSPS, antara lain ketepatan sasaran penerima yang masih memerlukan verifikasi lebih ketat, keterbatasan kemampuan swadaya sebagian masyarakat, variasi kualitas hasil pembangunan akibat perbedaan kondisi geografis dan bahan lokal, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi di tingkat desa. Keterbatasan anggaran dan penyesuaian kebijakan pusat juga turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan program di daerah. Oleh karena itu, penguatan pendampingan teknis, peningkatan kapasitas fasilitator lapangan, serta sinkronisasi regulasi pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program BSPS di Kabupaten Tana Tidung [15].

B. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tana Tidung

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya akses terhadap hunian yang layak. Rumah memiliki peran fundamental sebagai pusat aktivitas keluarga, sarana pembinaan sosial, serta faktor penting dalam pembentukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat [16]. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui BSPS diarahkan tidak hanya pada penyediaan fisik bangunan, tetapi juga pada penguatan kemandirian dan partisipasi masyarakat melalui pendekatan swadaya dan gotong royong [17]. Pelaksanaan BSPS di Kabupaten Tana Tidung diawali dengan tahapan sosialisasi program kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi tahap krusial karena bertujuan menyampaikan informasi mengenai tujuan program, kriteria penerima, mekanisme pelaksanaan, serta hak dan kewajiban masyarakat penerima bantuan. Sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, sosialisasi

dimaksudkan untuk membangun pemahaman bahwa BSPS merupakan bantuan stimulan, bukan hibah penuh, sehingga membutuhkan partisipasi aktif penerima. Hasil wawancara dengan penerima bantuan menunjukkan bahwa informasi program diperoleh melalui perangkat desa, RT, dan pertemuan di balai desa. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung telah melaksanakan fungsi sosialisasi secara berjenjang hingga ke tingkat masyarakat, sebagaimana juga diamanatkan dalam Surat Edaran Dirjen Perumahan Nomor 14 Tahun 2022.

Setelah sosialisasi, tahapan berikutnya adalah proses pendaftaran dan verifikasi calon penerima bantuan. Pendaftaran dilakukan melalui pemerintah desa dengan melengkapi persyaratan administratif seperti KTP, KK, dan bukti kepemilikan lahan. Selanjutnya, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bersama tim teknis melakukan verifikasi administrasi dan survei lapangan untuk memastikan kondisi fisik rumah, status kepemilikan lahan, serta kesesuaian calon penerima dengan kriteria MBR. Proses ini sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 dan ditegaskan oleh Swasanti (2020) bahwa verifikasi lapangan merupakan instrumen penting untuk menjamin ketepatan sasaran program BSPS. Di Kabupaten Tana Tidung, verifikasi dilakukan secara cermat dengan melibatkan pemerintah desa, sehingga meminimalkan risiko salah sasaran.

Tahap selanjutnya adalah penetapan Daftar Penerima Bantuan (DPB) yang menjadi dasar legal dan administratif pelaksanaan program. DPB ditetapkan setelah melalui proses validasi data dan verifikasi lapangan, kemudian diusulkan ke Kementerian PUPR. Penetapan DPB berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, menjamin transparansi, serta mencegah tumpang tindih dengan program bantuan lainnya [18]. Pada tahun 2024, jumlah penerima BSPS di Kabupaten Tana Tidung tercatat sebanyak 138 keluarga yang didanai melalui APBD dan Dana Desa. Transparansi penetapan DPB dinilai penting karena berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program BSPS [19]. Setelah DPB ditetapkan, pelaksanaan program memasuki tahap penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknis rumah. Penyusunan RAB dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), TFL, dan tenaga teknis. RAB menjadi pedoman utama penggunaan dana stimulan agar tepat sasaran dan sesuai standar teknis. Di Kabupaten Tana Tidung, pembiayaan BSPS dilakukan melalui skema sharing anggaran antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan proporsi 50:50. Menurut [20], RAB yang disusun secara rinci dan partisipatif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana serta mempermudah pengawasan. Sementara itu, desain teknis rumah disusun sederhana namun memenuhi standar rumah layak huni, seperti aspek struktur, ventilasi, pencahayaan, dan sanitasi, sehingga mendorong rasa memiliki dan partisipasi aktif masyarakat [21].

Bentuk bantuan BSPS yang diterima masyarakat di Kabupaten Tana Tidung pada umumnya berupa material bangunan dan pendampingan teknis, bukan dana tunai. Material disalurkan melalui penyedia yang ditunjuk dan diambil sesuai RAB yang telah disetujui. Skema ini bertujuan mencegah penyalahgunaan bantuan serta menjamin kualitas pembangunan rumah [19];[21]. Selain material, penerima juga mendapatkan pendampingan intensif dari TFL yang meliputi bimbingan teknis pembangunan, pengawasan mutu, serta pelaporan. [22] menegaskan bahwa pendampingan merupakan kunci keberhasilan BSPS karena membantu masyarakat memahami aspek teknis dan administratif program.

Pendampingan BSPS di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan program. TFL mendampingi masyarakat sejak tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pelaporan akhir. Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, yakni memfasilitasi gotong royong dan memperkuat kapasitas masyarakat (Sulaiman, dkk, 2024). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM TFL sangat menentukan keberhasilan implementasi BSPS, terutama dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kondisi lapangan [23]. Meskipun memberikan manfaat nyata, pelaksanaan BSPS di Kabupaten Tana Tidung juga menghadapi berbagai kendala. Kendala utama yang dialami penerima bantuan adalah keterbatasan waktu, tenaga kerja, dan kemampuan teknis, mengingat sebagian besar penerima harus membagi waktu antara bekerja dan membangun rumah secara swadaya. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses material bangunan turut menghambat proses pembangunan. Dari sisi pendamping, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kapasitas SDM TFL, serta kendala administrasi dan komunikasi (Sulaiman, dkk, 2024). Penelitian [20] juga mencatat bahwa ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi lapangan masih menjadi persoalan di beberapa daerah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pendekatan komunikasi partisipatif menjadi strategi penting. Komunikasi yang dialogis dan transparan antara pemerintah, TFL, dan masyarakat penerima dapat meningkatkan pemahaman, memperkuat partisipasi swadaya, serta meminimalkan konflik dan keterlambatan pelaksanaan [24]. Selain itu, penguatan kapasitas TFL melalui pelatihan berkelanjutan, digitalisasi proses administrasi, penguatan gotong royong, monitoring berbasis komunitas, serta kolaborasi multipihak dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan BSPS [25]. Dari sisi dampak, BSPS memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan

C. Hasil uji NVIVO

[illegible]

Hasil analisis NVivo melalui word cloud, treemap, dan mind map menunjukkan bahwa kata dominan seperti *rumah*, *program*, dan *bantuan* merepresentasikan tiga dimensi kesejahteraan yang saling berkelindan, yaitu fisik, sosial, dan psikologis. Dalam kerangka kesejahteraan multidimensi, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup kualitas relasi sosial dan kondisi psikologis individu maupun keluarga [29].

Dominasi kata *rumah* dan *layak* dalam *Word Frequency Query* menegaskan bahwa kebutuhan dasar pangan menjadi isu sentral. Dalam perspektif kesejahteraan fisik, hunian layak merupakan indikator utama kualitas hidup karena berkaitan langsung dengan kesehatan, keamanan, dan perlindungan terhadap risiko lingkungan [29]. Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui skema Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang memberikan bantuan material bangunan menunjukkan pendekatan berbasis kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Temuan NVivo yang memperlihatkan pembahasan masyarakat mengenai kondisi rumah sebelum dan sesudah bantuan memperkuat argumentasi bahwa BSPS berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan fisik penerima.

Kemunculan kata *kami* serta interaksi dengan *bapak* (aparatur desa/pendamping) menunjukkan adanya relasi sosial dan kolektivitas dalam implementasi program. Dalam teori kesejahteraan sosial, partisipasi, kepercayaan, dan hubungan institusional merupakan elemen penting dalam membangun modal sosial. Visualisasi treemap yang menempatkan kategori *program* sebagai porsi terbesar mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya memaknai hasil fisik, tetapi juga proses tata kelola, transparansi, dan pendampingan. Hal ini memperkuat argumen bahwa BPS berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus memperkuat legitimasi negara di tingkat akar rumput [30].

Hasil *mind map* menunjukkan dampak berupa rasa aman, kebanggaan sosial, dan meningkatnya kepercayaan diri penerima. Literatur kesejahteraan kontemporer menegaskan bahwa keamanan hunian berkorelasi positif dengan stabilitas emosional dan harga diri keluarga berpenghasilan rendah. Dengan

demikian, temuan NVivo tidak hanya mengindikasikan perubahan fisik bangunan, tetapi juga transformasi psikologis berupa meningkatnya rasa percaya diri dan optimisme terhadap masa depan. Analisis NVivo memperlihatkan pola tematik yang konsisten antara kebutuhan dasar (rumah), mekanisme kebijakan (program), dan bentuk intervensi (bantuan). Keterhubungan tiga tema besar tersebut menunjukkan bahwa dampak BSPS bersifat multidimensional dan sistemik, bukan sekadar intervensi fisik jangka pendek. Secara konseptual, temuan ini sejalan dengan pendekatan *multidimensional poverty* yang menyatakan bahwa perbaikan satu dimensi dasar (hunian) dapat memicu efek berantai pada dimensi lain seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial [30]. Selain itu, skema bantuan non-tunai dan pendampingan teknis sebagaimana diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2023) memperkuat aspek akuntabilitas dan efektivitas implementasi kebijakan.

Dengan demikian, temuan NVivo tidak berhenti pada tataran deskriptif-linguistik, melainkan berfungsi sebagai evidensi empiris kualitatif yang memperkuat argumentasi teoretik mengenai dampak multidimensional Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dominasi tema *rumah* menegaskan kontribusi langsung program terhadap peningkatan kualitas fisik hunian sebagai fondasi *material well-being*, yang dalam literatur kesejahteraan diposisikan sebagai prasyarat pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kerentanan structural [31]. Intensitas pembahasan mengenai *program* serta interaksi dengan aparat desa menunjukkan bahwa BSPS juga berfungsi sebagai instrumen penguatan *social well-being*, melalui peningkatan kepercayaan terhadap institusi, partisipasi komunitas, dan legitimasi kebijakan publik di tingkat lokal. Lebih lanjut, narasi tentang rasa aman, kenyamanan, dan kebanggaan sosial mencerminkan dimensi *psychological well-being*, yakni transformasi subjektif berupa meningkatnya harga diri, stabilitas emosional, dan optimisme keluarga penerima (Jingnan, Tengku Wook, 2024). Namun demikian, kemunculan tema terkait prosedur administratif dan keterbatasan jangkauan mengindikasikan adanya *implementation gap* antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Literatur kebijakan publik menegaskan bahwa efektivitas program perlindungan sosial sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, kapasitas birokrasi lokal, serta aksesibilitas prosedur bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, simplifikasi mekanisme administratif, dan perluasan cakupan penerima bukan sekadar rekomendasi teknis, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan keberlanjutan dampak kesejahteraan secara lebih inklusif, akuntabel, dan sistemik [32].

Kebaharuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tana Tidung berlangsung secara prosedural sesuai regulasi, namun masih menghadapi tantangan implementatif di tingkat lapangan. Dalam konteks geografis Desa Sesayap yang berciri dataran rendah dan lahan rawa dengan kepadatan penduduk rendah, BSPS menjadi intervensi strategis berbasis kebutuhan dasar untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil penelitian, termasuk analisis NVivo, mengonfirmasi bahwa dampak program bersifat multidimensional, meliputi peningkatan kualitas fisik rumah (*material well-being*), penguatan partisipasi dan legitimasi sosial melalui mekanisme swadaya dan pendampingan (*social well-being*), serta peningkatan rasa aman, harga diri, dan optimisme keluarga penerima (*psychological well-being*). Selain itu, program turut memberikan efek ekonomi lokal melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga dan perputaran tenaga kerja konstruksi. Namun demikian, masih ditemukan *implementation gap* yang ditandai oleh persoalan ketepatan sasaran, keterbatasan kapasitas swadaya, variasi kualitas pembangunan akibat kondisi geografis, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, efektivitas dan keberlanjutan BSPS sangat bergantung pada penguatan tata kelola, kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan, sinkronisasi kebijakan pusat–daerah, serta peningkatan sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan yang terbatas pada Desa Sesayap dan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Tana Tidung membatasi generalisasi temuan ke daerah lain dengan karakteristik berbeda. Kedua, pendekatan kualitatif berbasis wawancara dan analisis NVivo bergantung pada persepsi informan sehingga berpotensi mengandung bias subjektif. Ketiga, penelitian ini belum menggunakan data kuantitatif longitudinal untuk mengukur dampak kausal dan jangka panjang program. Oleh karena itu, studi lanjutan dengan desain *mixed methods* dan cakupan wilayah yang lebih luas diperlukan untuk memperkuat validitas dan kedalaman analisis.

Simpanan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tana Tidung telah berjalan secara prosedural sesuai regulasi dan memberikan

dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini terbukti tidak hanya memperbaiki kualitas fisik hunian (material well-being), tetapi juga memperkuat partisipasi sosial, legitimasi institusi, dan modal sosial masyarakat (social well-being), serta meningkatkan rasa aman, harga diri, dan optimisme keluarga penerima (psychological well-being). Analisis tematik berbantuan NVivo memperlihatkan keterkaitan sistemik antara aspek rumah, program, dan bantuan sebagai representasi dampak multidimensional kebijakan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya implementation gap yang ditandai oleh keterbatasan cakupan bantuan, ketepatan sasaran, kapasitas swadaya, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), simplifikasi prosedur administratif, dan sinergi kebijakan pusat–daerah menjadi prasyarat penting untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan dampak kesejahteraan program, khususnya dalam konteks wilayah 3T.

Daftar Pustaka

- [1] Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, “Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” 2024.
- [2] U. N. H. Settlements, “Envisaging the Future of Cities,” 2022.
- [3] K. D. Perkebunan and P. Papua, *World Bank Group*.
- [4] U. Riyadi, F. Azmi, and D. Prasmanani, “BPS Kabupaten Tana Tidung,” 2023.
- [5] F. Eliza, Nurmalsari, and Zulkifli, “Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer,” *Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, vol. 1, no. 2, pp. 1–12, 2021.
- [6] P. Febrihana, Sishadiyati, and W. Priana, “Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Mendorong Dan Meningkatkan Inisiatif Keswadayaan Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari Untuk Memperbaiki Rumah Tak Layak Huni,” vol. 9, no. November, pp. 538–546, 2023.
- [7] H. Abidin, I. Mukhlis, and A. Zagladi, “Multi-method Approach for Qualitative Research: Literature Review with NVivo 12 PRo Mapping,” vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [8] A. Qalbi and M. Adnan, “Evaluasi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok,” *Evaluasi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok*, vol. 4, pp. 1819–1832.
- [9] K. Dhakal, “NVivo,” *Journal of the Medical Library Association*, vol. 110, no. 2, pp. 270–272, 2022, doi: 10.5195/jmla.2022.1271.
- [10] Badan Pusat Statistik, “BPS Kabupaten Tana Tidung 2020,” 2024.
- [11] F. Ardiansyah and I. Prabawati, “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Rangka Peningkatan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Sidoarjo,” vol. Vol 11 N, pp. 2455–2464, 2023.
- [12] B. T. Tidung, “peraturan bupati tana tidung,” 2021.
- [13] Y. N. Cahyanto, U. A. Aziz, and L. B. Setyaning, “Analisis Faktor Risiko Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem,” *Surya Beton : Jurnal Ilmu Teknik Sipil*, vol. 7, no. 2, pp. 194–201, 2023, doi: 10.37729/suryabeton.v7i2.3769.
- [14] D. I. Parkah, A. F. Utami, and S. Huda, “Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan Ekstrem Dan Stunting Di Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,” vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [15] M. Telaumbanua and M. Nugraheni, “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 4(2).,” vol. 4, no. 02, pp. 418–436, 2018.
- [16] R. Rafsanjani and F. U. Ritonga, “Pra-Pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan,” *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, vol. 3, no. 2, pp. 103–109, 2024, doi: 10.55123/abdisoshum.v3i2.3687.
- [17] Ach. A. Romadhan, H. Saidatul, T. S. Iradhad, and M. Kamil, “Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tabalong : Sebuah Evaluasi,” *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 4, no. 1, pp. 26–44, 2022, doi: 10.52423/neores.v4i1.12.
- [18] R. A. Fadhilah, Marsetyo, and R. Oktafia, “Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Pengurangan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni,” vol. 6, no. 1, pp. 125–133, 2024.

- [19] Y. Pangestu, H. Suherman, R. Mulyani, and N. Carlo, "Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok," *Jurnal Talenta Sipil*, vol. 7, no. 2, p. 703, 2024, doi: 10.33087/talentsipil.v7i2.584.
- [20] N. E. Tasmiatul, "Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Pemberdayaan Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara," vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2024.
- [21] M. F. Algiffari, "Pendampingan Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Konawe Utara Pada Masa Pandemi Covid-19," *JILPI : Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, vol. 1, no. 3, pp. 489–496, 2023, doi: 10.57248/jilpi.v1i3.129.
- [22] S. W. Utomo and H. K. Aji, "Strategi Komunikasi Fasilitator Pemberdayaan Kementerian PUPR dalam Membangun Kesadaran dan Dukungan Masyarakat," *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI p-ISSN*, vol. 8, no. 2, pp. 1–11, 2024.
- [23] M. Sahid, H. Haeruddin, A. D. Fitriana, and W. Wandu, "Communication Strategies of Village Government to Increase Community Participation in Development," *Palakka : Media and Islamic Communication*, vol. 6, no. 1, pp. 21–32, 2025, doi: 10.30863/palakka.v6i1.7552.
- [24] M. Jois, S. S. Kasim, and Sarpin, "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Waara Kecamatan Lohia Kabupaten Muna," *Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol. 5, no. 1, pp. 55–70, 2024, doi: 10.52423/welvaart.v5i1.6.
- [25] P. Puspitasari, S. Huda, and A. F. Utami, "Implementasi Program BSPS Sebagai Penanganan Kemiskinan Ekstrem Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kemuning," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9, no. 20, pp. 639–650, 2023.
- [26] F. F. Fernanda, Marseto, and F. L. Nisa, "Peran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Tempuran Kabupaten Ponorogo," vol. 9, no. 20, pp. 240–249, 2023.
- [27] A. Maiqirlana, S. Huda, and A. F. Utami, "Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Bantuan Andika," vol. 9, no. 20, pp. 71–83, 2023.
- [28] I. Growth, *Housing and Inclusive Growth*.
- [29] *Envisaging the Future of Cities*.
- [30] B. R. D. Putnam, N. Y. Simon, and R. M. Waugaman, "The upswing : How America came together and how we can do it again," pp. 1–4, 2024, doi: 10.1002/aps.1862.
- [31] Viyulia, Arenawati, and A. Sjafari, "Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang," vol. 16, no. 1, pp. 1–13, 2023.
- [32] P. Herd and D. Moynihan, "Administrative Burdens in the Social Safety Net," vol. 39, no. 1, pp. 129–150, 2025.